

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan yaitu Pilkada Ulang Kabupaten Pasaman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan KPU dan Bawaslu Kabupaten Pasaman mengenai Pilkada Ulang Kabupaten Pasaman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada prinsipnya menempatkan PSU sebagai konsekuensi yuridis dan instrumen korektif demokrasi. KPU Kabupaten Pasaman memandang bahwa PSU merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan meskipun sebelumnya menilai seluruh tahapan Pilkada telah dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Pasaman melihat PSU sebagai bagian dari penegakan hukum pemilu untuk memulihkan keadilan, kepastian hukum, serta menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada.
2. Dasar dan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 berbasis Pasal 24C UUD 1945, UU Pilkada, dan bukti lain (klarifikasi PN, Bawaslu, forensik) soal penyembunyian pidana Anggit (ancaman 4 tahun). Meski selisih suara tipis (1,88%), MK batalkan Keputusan KPU 851/2024 karena pelanggaran sistematis dan memerintahkan untuk dilakukannya PSU dalam memilih kepala daerah di Kabupaten Pasaman.
3. *Siyasah Dusturiyah* memandang Putusan Mahkamah Konstitusi No.02/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang memerintahkan PSU di Kabupaten Pasaman sudah selaras dengan prinsip keadilan, amanah, syura, dan kemaslahatan dalam siyasah dusturiyah. Hal ini berfungsi

sebagai pengawasan untuk menjaga integritas kepemimpinan dan menjamin pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat sesuai nilai konstitusi dan etika Islam.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pilkada Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.02/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan terkait dapat memperkuat koordinasi, akurasi verifikasi dokumen, serta kesiapan teknis dalam setiap proses penyelesaian sengketa Pilkada, karena hal ini penting guna memastikan tahapan pemilihan berjalan lebih efektif, berkepastian hukum, serta meminimalkan terulangnya permasalahan administratif di kemudian hari.
2. KPU dan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagai penyelenggara pemilu untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan ketelitian dalam verifikasi dokumen pencalonan, serta memperkuat pengawasan di setiap tahapan Pilkada, karena hal tersebut penting guna mencegah terulangnya pelanggaran administrasi, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan penyelenggaraan Pilkada yang lebih berintegritas dan sesuai dengan prinsip keadilan pemilu.
3. Diharapkan kepada peneliti berikutnya dapat melakukan pengembangan kajian, dengan melakukan pendalaman analisis serta memperluas objek penelitian, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih komprehensif terhadap pembahasan Pilkada Ulang dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Sitti. 2020. "The Evaluation of Regional Head Election: Developing Synergy of Regional Autonomy and Regional Head Election." *Jurnal Bina Praja* 12 (2): 137–51. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.137-151>.
- Ardipandanto, Aryojati. 2022. "Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang PILKADA 2020: Perspektif Profesionalisme KPU." *Kajian* 27 (1): 1–12.
- Ari, Ernesta Arita, Firzhal Arzhi Jiwantara, Johny Koynja, Edy Sony, Artikel Penelitian, dan Kata Kunci. 2024. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada di Indonesia The Role of the Constitutional Court in Resolving Regional Election Disputes in Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7 (12): 4790–94. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6657>.
- Azzahra, A N, Y Januari, dan L F Rizal. 2024. "Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah." *UNES Law Review* 6 (4): 11818–32.
- Baharuddin Riqiey. 2023. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *Japhtn-Han* 2 (1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>.
- Bani, Nurianto, Ida. 2024. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1 (3): 232–45. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.545>.
- Bawamenewi, Adrianus. 2020. "Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara." *Jurnal Warta Edisi* 14(1):104–14.

<https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v14i1.545>.

Bawaslu. 2020. "Sejarah Pengawasan Pemilu." 2020.
<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>.

Bawaslu, PPID. 2017. "Tugas, Wewenang, dan Kewajiban." 2017.
<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>.

Begouvici, M Eza Helyatha. 2022. "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perpektif Siyasah Dusturiyah." *Jurnsl Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* 1 (88): 58-75.

BPK RI. 2016. "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016." 2016.
LN.2016/NO.130, TLN NO.5898, LL SETNEG : 70 HLM.

———. 2020. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi." 2020. LN.2020/No.216, TLN No.6554, jdih.setneg.go.id : 12 hlm.

BPS Kabupaten Pasaman. 2025. "Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2025" 39.

Busthami, Dachran. 2018. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46 (4): 336.
<https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>.

Dianisa, Tifani Rizki, dan Gayatri Dyah Suprobawati. 2022. "Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." : *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasiona* 1:298-305.

Djazuli, Prof. H.A. 2003. *Fiqh Siyasah*. Diedit oleh PT Fajar Interpratama Mandiri. 2 ed. Jakarta: KENCANA PRENANDA MEDIA GROUP Jl. Tambora Raya No. 23 Rawamangun Jakarta 13220.

Fadly, Muhammad, Syahwala Harahap, dan Rahmad Efendi Rangkuti. 2025. "KOTAK KOSONG SEBAGAI PEMENANG: PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Muhammad Fadly Syahwala Harahap 1) , Rahmad Efendi Rangkuti 2) 1,2”
6.

Felicia. 2022. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* p-ISSN: 2723-6609; e-ISSN: 2745-5254 3 (4): 574–85.
<https://doi.org/10.36418/jist.v3i5.422>.

Fitra Arsil, Qurрата Ayuni Fakultas. 2022. “Kedudukan Hukum Khusus dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Exclusive Legal Standing of Judicial.” *Jurnal Konstitusi* 19 (4).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1941>.

Fudin, Hanif. 2022. “Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 19 (1): 202. <https://doi.org/10.31078/jk1919>.

Habibillah, Fadjri, dan Syamsir Syamsir. 2024. “Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4 (1): 132–40. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.18155>.

Harahap, Dessy Agustina. 2017. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANA PENGAWASAN PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI DAERAH” 10 (1): 10–17.

Hasaziduhu Moho. 2019. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Hasaziduhu Moho. ‘Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.’ *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13 (1): 138–49.

Hidayawan, Agung Anugrah, Sandy Kurnia Christmas, dan Yudith Evametha. 2024. “Implikasi dan Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang

Penghitungan Suara Ulang Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Sekadau.” *Noblwssw Oblige Law Journal* 01 (2): 67–76.

Hindiawati, Wahyu. 2023. “Urgensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016.” *Judge : Jurnal Hukum* 04 (02): 59–69.

Ilhami, Haniah. 2020. “The Relevance of Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017 Related to the Dispensation of Marriage to Prevent Child Age Marriage.” *Jurnal Konstitusi* 17 (2): 284–308. <https://doi.org/10.31078/jk1723>.

Indonesia, KPU Republik. 2016. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017.” *Educacao e Sociedade* 1 (1): 1689–99.

INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK. 2014. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.” *Pontificia Universidad Catolica del Peru* 8 (33): 44.

Irwansyah, dan Zenal Setiawan. 2023. “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2 (1): 68–75.

Jaidi, Muhammad, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, dan Nuril Khasyi'in. 2024. “Kedudukan Siyasah Dusturiyyah Studi Kasus Politisasi Pemilu 2024 Analisis Peradilan Hukum Islam.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 (2): 662–83. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.543>.

Jdih KPU Kabupaten Pasaman. 2025. “Pilkada Pasaman Diuji Mahkamah: MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Terpidana.” 2025. <https://jdih.kpu.go.id/blog/read/17439/pilkada-pasaman-diuji-mahkamah-mk-putuskan-pemungutan-suara-ulang-tanpa-terpidana>.

Kamizi, Fajar, Universitas Islam, Negeri Raden, dan Fatah Palembang. 2025. “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya

Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia,” 17–24.

Khotob, Khotob Tobi Almalibari. 2022. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1 (2): 36–45. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.45>.

Konstitusi, Mahkamah. 2025. “PUTUSAN NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025.” *Sustainability (Switzerland)* 11 (1): 1–14.

KPU Pasaman. 2024. “851/KPTS/Kab-Pasaman/2024.” 2024. <https://jdih.kpu.go.id/sumbar/pasaman/pencarian>.

Kurniawan, Hamdan. 2020. “Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu dan Faktor Penyebab.” *Kpu Ri*, no. 2019: EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019 BIDANG EVALUASI ASPEK HUKUM PEMILU, 2.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. 2019. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasa Dusturiyah. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53.

Mahkamah Konstitusi. 2024. “PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.” 2024. <https://www.mkri.id/peraturan/peraturan-mk?search=Nomor+3+Tahun+2024>.

MK RI. 2025. “Putusan Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025.” 2025. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12368_1740359008.pdf.

Mochtar, Zainal Arifin, dan eddy O.S Hiariej. 2021. *Teori , Asas dan Filsafat Hukum Zainal Arifin Mochtar Eddy O . S Hiariej*. Diedit oleh M.PA. Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL. Cetakan 1. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).

Muhaimin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. “Hukum dan Penelitian Hukum” 8 (1): 134.

- Murod, M. 2021. *Buku Politik*. Diedit oleh MA & Dr. Fajri M. Kasem Muktasim. *Repository.Umj.Ac.Id*. 1 ed. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Musta'ana. 2018. "PADA PEMILUKADA TAHUN 2018 DI KABUPATEN BOJONEGORO (Studi Kasus Pasangan Anna M u ' a wannah dan Budi Irawanto)." *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Universitas Bojonegoro* ISSN : 2549 - 3566 3 (1): 14-17.
- Muthalib, Salman Abdul, dan Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi. 2022. "Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 4 (2): 150. <https://doi.org/10.22373/tafse.v4i2.13176>.
- Nastain, Muhamad, dan Catur Nugroho. 2022. "Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 13 (1): 167-84. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.167-184>.
- Pasamankab.co.id. 2021. "Letak Geografis Kabupaten Pasaman." 2021. <https://pasamankab.go.id/halaman/letak-geografis-kabupaten-pasaman>.
- Pekalongan, KPU Kab. n.d. "Sejarah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia." <https://kab-pekalongan.kpu.go.id/page/read/sejarah-komisi-pemilihan-umum-republik-indonesia>.
- Pemerintah Pusat. 1945. "Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Dalam Satu Naskah." *Pemerintah Pusat*, 1-21.
- Presiden Republik Indonesia. 2017. "UU no.7 2019 Pemilu Serentak." *Undang-Undang Pemilu*.
- Prio Suryanto Ibrahim, et. all. 2025. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2 (1): 287-98.

<https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.756>.

Purwadi, Wira. 2018. "PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN: PEMILIHAN LANGSUNG VERSUS PEMILIHAN PERWAKILAN " Election of Regional Heads in the Perspective of State Administration : Direct Election Purwadi, W. (n.d.). PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF." *Legalitas* 12 (2): 78-89.

Rauta, Umbu. 2025. "Justification of the Thematic Legislation in Indonesia Justifikasi Pembentukan Undang-Undang Tematik di Indonesia" 22 (3).

Republik Indonesia. 2016. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U," 1-90.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Sahrin, Abu, dan Farid Adnir. 2024. "Demokrasi dalam Dunia Islam Perspektif Al-Mawardi" 4 (5): 81-87.

Saivol Virdausa, Siciliya Mardian Yoelb, Wimpy Ardhy Prasetya. 2024. "POLA PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA 2024: STRATEGI PERMOHONAN DAN UPAYA PENCEGAHAN," 231-57.

Suharti. 2015. "AL-SIYASAH AL- SYAR ' IYYAH ' INDA IBN TAIMIYAH (Politik Islam Ibnu Taimiyah) Pendahuluan Berbicara tentang politik Islam (siyasah syar ' iyyah) tidak pernah sampai pada titik final . Bahkan hingga saat ini masih menjadi diskusi panjang mengenai inter." *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 2 (2): 24-43.

Surokim. 2016. "Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi." *Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur*, 285.

Ulum, M. B., Rachmad, R., & Wahyudi, A. 2014. "Evaluasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Evaluation of the Authority of the Constitutional Court Decide Disputes of the General Election of Regional Heads" 1 (2): 69–79.

Undang-Undang. 2017. "Undang-Undang Republik Nomor 7 Tahun 2017."

UUD. 1945. "UUD" 1 (1).

"UUD RI 1945." n.d. file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/Telegram Desktop/UUD45 ASLI.pdf.

Widodo Ekatjahjana. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi*.

Wikipedia. 2010. "Profil Kabupaten Pasaman." 2010. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasaman.

UIN IMAM BONJOL
PADANG